

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak layak. Oleh karena itu, negara, pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan perlindungan anak secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak sangat ditentukan oleh kinerja aparatur yang melaksanakannya. Kinerja pegawai menjadi aparatur penting karena menceiminkan, kemampuan, tanggung jawab, dan komitmen pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Anwar Prabu Mangkunegara (2017) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seseorang sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan. Dengan demikian, kinerja pegawai tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup sikap kerja, kerja sama, dan dedikasi dalam melaksanakan tugas organisasi.

Program Perlindungan Khusus Anak salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Program ini lebih menekankan pada upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sekolah, dan lingkungan desa mengenai hak-hak anak, pencegahan kekerasan, serta pencegahan bullying. Pendekatan preventif ini diharapkan mampu menekan terjadinya kekerasan terhadap anak sejak dini dan membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Di tingkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pencegahan dan sosialisasi, seperti penyuluhan kesekolah dan desa serta pemberian edukasi kepada masyarakat. Sehingga kinerja pegawai menjadi faktor penting dalam melaksanakan keberhasilan program

Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Juga Melaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kondisi sosial masyarakat yang beragam, luas wilayah pelayanan, serta tingkat pemahaman masyarakat yang belum merata mengenai pentingnya perlindungan anak. Kondisi ini menuntut kinerja pegawai yang optimal agar kegiatan pencegahan dan sosialisasi dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil obsevasi awal yang dilakukan peneliti pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pencegahan atau sosialisasi program perlindungan khusus anak oleh pegawai bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang tercermin dari masih terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan bullying di masyarakat. *(Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)*
2. Kurangnya peran aktif kepala Bidang PPA, meskipun pegawai pelaksana di Bidang PPA telah menjalankan tugasnya dengan baik, seperti menyiapkan materi, melakukan sosialisasi ke sekolah dan desa, serta mendampingi masyarakat dalam kegiatan perlindungan anak, namun peran kepala bidang masih kurang aktif. Kepala bidang sering hadir secara fisik dalam kegiatan sosialisasi, tetapi hanya duduk tanpa memberikan penjelasan, arahan, ataupun partisipasi langsung dalam penyampaian materi kepada peserta. *(Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)*
3. Pelaksanaan sosialisasi masih belum sepenuhnya merata ke seluruh sekolah dan desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah terlaksana dengan baik secara umum, namun dari aspek pemerataan pelaksanaan masih belum optimal. *(Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak Pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini di tetapkan untuk memperjelas batasan permasalahan agar penelitian lebih terarah. Penelitian ini difokuskan pada kinerja pegawai pada Bidang perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak yang bersifat pencegahan atau sosialisasi.

Penanganan ini tidak membahas penanganan teknik kasus terhadap anak secara mendalam, melainkan menitikberatkan pada bagaimana kinerja pegawai sebagai pelaksana program pencegahan, khususnya dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak.

Dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program, seperti kebijakan, sumber daya organisasi, dan lingkungan eksternal, penelitian ini hanya memfokuskan pada aspek kinerja pegawai, karena pegawai merupakan pelaksana utama yang berperan langsung dalam menjalankan kegiatan lapangan.

Adapun kinerja pegawai yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada teori Anwar Prabu Mangkunegara (2017), yang menjelaskan bahwa kinerja dapat diukur melalui indikator:

1. Kualitas Kerja
2. Kuantitas Kerja
3. Tanggung Jawab
4. Kerjasama

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja pegawai pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak yang bersifat pencegahan atau sosialisasi?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja pegawai pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kinerja pegawai Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak yang bersifat pencegahan atau sosialisasi.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja pegawai pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan Program Perlindungan Khusus
Anak

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah Khazanah Keilmuan dalam bidang Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan Kinerja pegawai dalam melaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak yang bersifat pencegahan atau sosialisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas Kinerja pegawai dalam melaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak dilingkungan instansi pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dalam meningkatkan kinerja pegawai pada pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak, terutama dalam kegiatan pencegahan atau sosialisasi.